



Eksplorasi Pendekatan *Dynamic Governance* dalam Pengembangan Rumah Talenta Digital di Kabupaten Nganjuk

Dhiyaa Ulhaq Rohmatulloh^{1*}, Adi Soesiantoro², Ghulam Maulana Iman³

¹⁻³Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Indonesia

Alamat : Jl. Semolowaru No. 45, Menur Pumpungan, Kec. Sukolilo, Surabaya

Korespondensi penulis : dhiyaaulhaqr22@gmail.com

Abstract. *The Nganjuk Regency Government shows a commitment to strengthen the capacity of MSME actors through activities such as digital training. However, the challenges of digital transformation demand a more adaptive strategy. The omah away program is present as a regional innovation in accelerating the digitalization of MSMEs, in line with the national vision towards the smart economy and digital transformation targets announced in the RPJMN. Based on the theory of Dynamic Governance with 3 variables such as Thinking Ahead, Thinking Again, and Thinking Across, this omah away program offers digital training, business legality facilitation, and marketing through digital platforms. This study highlights how the away house becomes an integrative model that not only provides technical training, but also builds a collaborative ecosystem between the government, business actors, the private sector, communities, education and society. Despite the impact on increasing the participation of digital MSMEs and reducing the unemployment rate, obstacles such as low business legality and online marketing effectiveness are still found. Therefore, critical reflection and cross-actor collaboration are key to the sustainability of the program. These findings strengthen the relevance of Dynamic Governance theory in the context of local-based digital transformation, as well as support efforts to achieve smart economy in areas with growing potential such as Nganjuk Regency.*

Keywords : *Digital Transformation, Dynamic Governance, MSMEs, Nganjuk Regency, Smart Economy.*

Abstrak. Pemerintah Kabupaten Nganjuk menunjukkan komitmen untuk memperkuat kapasitas pelaku UMKM dengan melalui kegiatan seperti pelatihan digital. Namun, tantangan transformasi digital menuntut strategi yang lebih adaptif. Program omah tandang hadir sebagai inovasi daerah dalam mempercepat digitalisasi UMKM, sejalan dengan visi nasional menuju *smart economy* dan target transformasi digital yang dicanangkan dalam RPJMN. Berbasis teori dari *Dynamic Governance* dengan 3 variabel seperti *Thinking Ahead, Thinking Again, dan Thinking Across* pada program omah tandang ini menawarkan pelatihan digital, fasilitasi legalitas usaha, hingga pemasaran melalui platform digital. Studi ini menyoroti bagaimana omah tandang menjadi model integratif yang tidak hanya memberikan pelatihan teknis, tetapi juga membangun ekosistem kolaboratif antara pemerintah, pelaku usaha, sektor swasta, komunitas, pendidikan dan masyarakat. Meskipun berdampak pada peningkatan partisipasi UMKM digital dan penurunan angka pengangguran, masih ditemukan kendala seperti rendahnya legalitas usaha dan efektivitas pemasaran daring. Oleh karena itu, refleksi kritis dan kolaborasi lintas aktor menjadi kunci keberlanjutan program. Temuan ini menguatkan relevansi teori *Dynamic Governance* dalam konteks transformasi digital berbasis lokal, serta mendukung upaya pencapaian *smart economy* di daerah dengan potensi yang berkembang seperti Kabupaten Nganjuk.

Kata Kunci : *Dynamic Governance, Transformasi Digital, UMKM, Smart Economy, Kabupaten Nganjuk*

1. LATAR BELAKANG

Indonesia adalah negara terbesar di ASEAN dengan sekitar 65,46 juta unit (Mariska, 2023). UMKM berkontribusi besar pada penciptaan lapangan kerja, kontribusi besar terhadap keberadaan masyarakat, dan merupakan tulang punggung ekonomi (Tambunan, 2019). Sektor ini menunjukkan ketahanan dan peran penting dalam menghadapi berbagai krisis ekonomi, termasuk krisis global, serta menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi Indonesia (M. Junaidi (Kasubbag Umum KPPN Tanjung Selor, 2023). Namun, UMKM menghadapi berbagai kendala utama seperti

keterbatasan akses pembiayaan, rendahnya pemanfaatan teknologi digital, dan kurangnya keterampilan manajerial (Debitur, 2023). Pemerintah menginisiasi program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan bunga ringan yang dapat memperkuat akses pembiayaan bagi UMKM, sekaligus mendorong digitalisasi sebagai upaya strategis dalam meningkatkan daya saing nasional (Monika Suhayati, 2024).

Provinsi Jawa Timur merupakan provinsi dengan jumlah UMKM terbanyak di Indonesia, yakni sekitar 9,78 juta unit, yang menyumbang lebih dari 57% terhadap Produk Domestik Regional Bruto (Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Jawa Timur, 2023). Namun demikian, pengembangan UMKM di wilayah ini, termasuk di Kabupaten Nganjuk yang memiliki sekitar 3.175 unit UMKM, masih menghadapi berbagai kendala seperti rendahnya tingkat literasi digital dan terbatasnya akses terhadap pembiayaan. Menanggapi hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Nganjuk menginisiasi Program Omah Tandang sebagai upaya pemberdayaan UMKM melalui pelatihan digital dan pendampingan terpadu. Program ini bertujuan mempercepat transformasi digital UMKM, meningkatkan kapasitas usaha, serta memperluas akses pasar digital, sejalan dengan konsep smart economy yang mengintegrasikan sumber daya manusia, teknologi, dan tata kelola untuk pertumbuhan ekonomi berkelanjutan (Annisah, 2017).

Meskipun Program Omah Tandang telah dirancang sebagai upaya strategis untuk memberdayakan masyarakat Kabupaten Nganjuk melalui pelatihan dan digitalisasi UMKM, terdapat kesenjangan yang cukup nyata antara tujuan program dan hasil implementasinya di lapangan. Pelatihan pemasaran digital yang diselenggarakan pemerintah seharusnya dapat meningkatkan kemampuan pelaku UMKM untuk memanfaatkan media sosial sebagai alat ekspansi usaha. Namun, realitas menunjukkan bahwa mayoritas pelaku usaha masih mengandalkan penjualan secara langsung (offline) karena rendahnya kemampuan adaptasi terhadap teknologi digital. Selain itu, banyak pelaku UMKM belum memiliki legalitas usaha seperti NIB, PIRT, maupun sertifikasi halal, padahal aspek ini sangat krusial untuk memperkuat kepercayaan konsumen dalam sistem penjualan daring. Hal ini menunjukkan bahwa pelatihan yang diberikan belum sepenuhnya menjawab kebutuhan riil pelaku usaha, baik dari sisi kapasitas digital maupun pemahaman terhadap urgensi legalitas usaha. Akibatnya, potensi digitalisasi yang seharusnya menjadi kekuatan utama dalam memperluas pasar justru belum bisa dimanfaatkan secara optimal.

Fenomena ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara kebijakan yang dirancang (top-down) dengan kondisi riil pelaku UMKM (bottom-up). Padahal, pendekatan yang adaptif dan partisipatif sangat diperlukan dalam membangun sistem tata kelola program yang berkelanjutan dan inklusif. Dalam konteks inilah, konsep Dynamic Governance menjadi relevan untuk menganalisis bagaimana pemerintah mampu berpikir ke depan, melakukan evaluasi ulang terhadap kebijakan, serta membangun sinergi lintas sektor untuk menjawab tantangan yang kompleks dan terus berkembang di era digital.

2. KAJIAN TEORITIS

Teori Pembangunan

Pembangunan merupakan proses multidimensional yang mencakup pertumbuhan ekonomi, perubahan sosial, politik, dan institusional secara berkelanjutan, serta bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui transformasi struktural dan peningkatan kapasitas manusia (Michael P. Todaro & Stephen C. Smith, 2015). Dalam praktiknya, keberhasilan dari pembangunan itu tergantung dari pemerintahan yang baik, kapasitas institusi lokal, serta partisipasi masyarakat (Merilee S. Grindle, 2007). Tujuan utama pembangunan adalah untuk menciptakan masyarakat yang adil dan kaya dengan materi dan perairan spiritual, melalui peningkatan akses terhadap kebutuhan dasar, penciptaan lapangan kerja, penguatan nilai kemanusiaan, dan perluasan pilihan sosial-ekonomi. Pembangunan yang efektif tidak hanya menghasilkan pertumbuhan ekonomi dan efisiensi, tetapi juga transformasi struktural dari ekonomi agraris ke industri serta peningkatan kualitas sumber daya manusia. Namun, perkembangan ini juga menimbulkan risiko efek samping, seperti kurangnya kerusakan lingkungan yang cermat. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan pembangunan yang berkelanjutan dan terkait konteks, sebagaimana dicontohkan oleh program Omah Tandang di Kabupaten Nganjuk yang memadukan inovasi publik, kolaborasi antar sektor, serta penguatan literasi digital generasi muda dalam mendorong pembangunan lokal berbasis talenta dan teknologi.

New Public Governance

Perubahan teknologi dan tuntutan terhadap pelayanan publik yang lebih responsif mendorong pemerintah untuk terus berinovasi. Dalam hal ini, pembaruan dalam pelayanan publik memegang peranan krusial guna mendorong peningkatan efisiensi serta mutu layanan yang diberikan kepada masyarakat. (Mutiarin, 2018). Peningkatan kapasitas aparatur, pemanfaatan kreativitas, dan pengembangan pola pikir inovatif

menjadi prasyarat untuk menghadirkan layanan publik yang adaptif.

Seiring perubahan paradigma tata kelola pemerintahan, muncul pendekatan *New Public Governance* (NPG) yang menekankan kolaborasi antar-aktor, jaringan organisasi, serta partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. NPG menyoroti pentingnya keterlibatan bersama dengan pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam pendekatan pelayanan publik. Paradigma ini mengedepankan pluralisme, desentralisasi kekuasaan, dan fleksibilitas jaringan sosial berbasis kepercayaan.

Lebih jauh, NPG menurut (Osborne, 2010), menjadi relevan ketika diintegrasikan dengan konsep *Collaborative Governance* yang menekankan pentingnya konsensus antara berbagai aktor dalam penyelesaian masalah publik. Hal ini sejalan dengan upaya inovatif lintas sektor yang mengedepankan kemitraan dan sinergi antar pihak.

Collaborative Governance

Dalam pelaksanaan pemerintahan, kerja sama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat merupakan pendekatan strategis yang krusial dalam menangani berbagai persoalan publik. Kolaborasi semacam ini dikenal dengan istilah *collaborative governance*, yaitu suatu proses di mana para pemangku kepentingan bekerja Bersama secara seimbang dalam pengambilan keputusan untuk mencapai tujuan bersama. *Collaborative governance* tidak hanya mencerminkan kerja sama antarlembaga, tetapi juga mengandung nilai-nilai dasar kolaborasi yang melekat dalam setiap tahap kebijakan publik.

(Ansell, 2007) merumuskan enam karakteristik utama *collaborative governance* : dimulai oleh lembaga publik, melibatkan aktor nonpemerintah, partisipasi aktif dalam pengambilan keputusan, forum yang terstruktur, pengambilan keputusan berbasis konsensus, dan fokus pada kebijakan/manajemen publik. Mereka menyatakan bahwa *collaborative governance* adalah pendekatan administratif yang mengedepankan keterlibatan langsung dan konsultatif dalam perumusan maupun pelaksanaan kebijakan publik (Ansell, 2007).

Lebih lanjut, *collaborative governance* sebagai konfigurasi dinamis yang dipengaruhi oleh konteks dan faktor pendorong sistem. Mereka menekankan tiga elemen kunci kolaborasi : prinsip keterlibatan, motivasi bersama, dan kemampuan kolektif untuk bertindak. Keberhasilan kolaborasi ditentukan oleh sejauh mana para aktor merasa memiliki kepentingan bersama serta kepemimpinan yang mampu memandu arah kolaborasi.

Dynamic Governance

Governance merupakan suatu sistem hubungan antara pemerintah dan masyarakat yang memungkinkan proses perumusan, pelaksanaan, serta evaluasi kebijakan dan program publik. Secara lebih luas, governance mencakup seperangkat aturan, lembaga, dan jaringan yang membentuk mekanisme kerja sebuah negara atau organisasi. Governance dapat melibatkan partisipasi dari seluruh pemangku kepentingan termasuk sektor pemerintahan, swasta, dan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan sosial (Neo & Chen, 2011).

Dalam perkembangannya, konsep governance mengalami perluasan menjadi dynamic governance, yaitu suatu pendekatan tata kelola yang bersifat adaptif dan berorientasi masa depan. (Neo & Chen, 2011) menyatakan bahwa dynamic governance terbentuk dari sinergi antara budaya (culture), kapabilitas (capability), dan perubahan (change). Pemerintahan yang dinamis ditandai dengan kemampuan untuk terus menyesuaikan kebijakan sesuai perkembangan lingkungan dan kebutuhan masyarakat. Dynamic governance memiliki tiga pilar utama :

- a. Thinking Ahead, yaitu kemampuan untuk mengenali dan mengantisipasi perubahan lingkungan masa depan serta merumuskan kebijakan yang mendukung kesiapan masyarakat terhadap peluang maupun risiko yang muncul.
- b. Thinking Again, yaitu kemampuan untuk mengevaluasi kembali efektivitas strategi dan kebijakan yang telah dijalankan, serta melakukan penyesuaian agar tetap relevan dengan kebutuhan dan tujuan jangka panjang.
- c. Thinking Across, yaitu kemampuan untuk mempelajari dari praktik terbaik lintas organisasi maupun lintas negara, serta mengadaptasi ide-ide baru sesuai dengan konteks lokal dan budaya yang khas.

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yang memberikan ruang bagi peneliti untuk memahami makna, tindakan, serta pengalaman individu atau kelompok melalui data non-numerik yang dikumpulkan melalui teknik observasi, wawancara, dan telaah dokumen. Pendekatan deskriptif digunakan untuk memahami karakteristik, dinamika, serta hubungan antar aktor atau kelompok dalam konteks sosial tertentu. Data yang dikumpulkan disajikan dalam bentuk narasi untuk mengungkap proses, mekanisme, serta makna di balik interaksi sosial yang terjadi.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk memberikan deskripsi ilmiah secara mendalam mengenai penerapan konsep *dynamic governance* dalam pelaksanaan Program Omah Tandang di Kabupaten Nganjuk.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil wawancara yang diperoleh kemudian dianalisis oleh penulis dengan menggunakan indikator-indikator dari teori stakeholder, yang direpresentasikan melalui tiga pendekatan pemikiran : Thinking Ahead (berpikir ke depan), Thinking Again (berpikir ulang), dan Thinking Across (berpikir lintas sektor), dengan uraian sebagai berikut :

a) Thinking Ahead (Berpikir Kedepan)

Bentuk implementasi dari *Dynamic Governance* pada program omah tandang tercermin dari upaya Pemerintah Kabupaten Nganjuk dalam merespons tantangan era digital melalui pemberdayaan masyarakat berbasis teknologi. Program tersebut dirancang tidak hanya sebagai pelatihan teknis, namun sebagai fondasi berkelanjutan untuk membangun ekosistem ekonomi digital, khususnya bagi pelaku UMKM. Fasilitas seperti ruang kerja, komputer, dan kamera disediakan secara gratis untuk mendorong literasi digital dan produktivitas warga.

Kolaborasi lintas sektor turut diperkuat, seperti dengan Dinas Kesehatan yang aktif mendukung proses legalisasi produk melalui sertifikasi PIRT, BPOM, dan halal, sebagai antisipasi terhadap regulasi pasar yang makin ketat. Peserta program juga menunjukkan kemampuan beradaptasi dengan memanfaatkan media sosial untuk pemasaran usaha makanan, menjajaki profesi digital seperti konten kreator dan affliator, serta merintis usaha kuliner kekinian. Semua ini menegaskan bahwa Program Omah Tandang telah menjadi langkah strategis dalam mempersiapkan masyarakat menghadapi transformasi digital secara inklusif dan berkelanjutan.

b) Thinking Again (Berpikir Ulang)

Program Omah Tandang diwujudkan melalui proses evaluasi rutin terhadap efektivitas pelatihan, materi, dan kualitas narasumber. Pemilihan pemateri dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan dampak bagi peserta dan efisiensi penggunaan dana APBD. Di sisi lain, Dinas Kesehatan juga mengevaluasi minimnya pemahaman pelaku UMKM tentang proses sertifikasi produk, sehingga kini dilakukan sosialisasi legalitas secara rutin setiap bulan bertepatan dengan agenda Omah Tandang.

Dari sudut pandang peserta, evaluasi program juga melahirkan berbagai masukan, seperti perlunya pendekatan “jemput bola” bagi UMKM di pelosok dan penambahan ruang live streaming untuk mendukung jualan online. Namun demikian, keberhasilan program sangat bergantung pada motivasi dan konsistensi masing-masing peserta. Meski seluruh peserta menerima pelatihan dan fasilitas yang sama, penerapan di lapangan tidak merata, menegaskan pentingnya refleksi dan penguatan komitmen individu dalam mencapai tujuan program secara berkelanjutan.

c) Thinking Across (Berpikir Lintas)

Aspek *Thinking Across* dalam program Omah Tandang tercermin dari kolaborasi lintas sektor yang melibatkan pemerintah daerah, pelaku usaha, institusi pendidikan, komunitas, serta pihak swasta. Meskipun kerja sama antar dinas secara formal terbentuk, pelaksanaan teknis banyak dibebankan kepada Dinas Kominfo, menimbulkan ketimpangan peran yang membuat Kominfo lebih selektif menjalin kolaborasi. Sebaliknya, Dinas Kesehatan dinilai konsisten dalam pengurusan legalitas produk seperti PIRT dan sertifikat halal, serta aktif memberikan sosialisasi langsung kepada pelaku UMKM. Program ini juga terus berinovasi dengan menggandeng lembaga pelatihan seperti Inixindo Jogja untuk edukasi AI dan pihak swasta seperti Bank Jatim untuk literasi keuangan dan pembuatan QRIS di lokasi pelatihan. Selain itu, Omah Tandang menjangkau desa dan sekolah guna meningkatkan partisipasi, khususnya dari kalangan muda, meskipun dihadapkan pada tantangan infrastruktur dan ketimpangan kualitas pendidikan. Peserta program juga mengapresiasi pendekatan jemput bola dan keterlibatan fasilitator desa serta alumni sebagai bentuk nyata dari keberpihakan pemerintah terhadap UMKM di daerah terpencil.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Program Rumah Talenta Digital Anjuk Ladang (Omah Tandang) di Kabupaten Nganjuk telah mengimplementasikan konsep *Dynamic Governance* melalui pendekatan *thinking ahead, thinking again, thinking across*. Program ini mempersiapkan pelaku UMKM dan generasi muda menghadapi tantangan digital melalui pelatihan literasi digital, pemasaran online, dan pengenalan teknologi seperti AI. Evaluasi rutin terhadap materi dan narasumber dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pelatihan, sementara refleksi mitra seperti Dinas Kesehatan turut memperkuat pendekatan edukatif dalam legalisasi usaha. Kolaborasi lintas sektor menjadi fondasi utama, meskipun masih terdapat ketimpangan peran, terutama di Dinas Kominfo. Oleh karena itu, untuk

memperkuat implementasi program, disarankan pelatihan digital dilakukan secara berkelanjutan berbasis komunitas, pembentukan forum evaluasi dan konsultasi rutin bersama peserta dan narasumber, serta penguatan kolaborasi melalui program sosialisasi legalitas usaha terpadu di desa-desa. Pendekatan ini diharapkan mampu memperkuat peran Omah Tandang sebagai wadah pemberdayaan masyarakat yang adaptif, kolaboratif, dan relevan terhadap kebutuhan lokal di era transformasi digital.

DAFTAR REFERENSI

- Annisah. (2017). Smart city planning proposal: Smart governance for regional government of Mukomuko Regency. *Jurnal Penelitian Teknologi Informasi dan Komunikasi*, 8(1), 59–80. <https://media.neliti.com/media/publications/233812-usulan-perencanaan-smart-city-smart-gove-d5e8410f.pdf>
- Ansell, C., & Gash, A. (2007). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18, 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Debitur, D. A. N. K. (2023). Pengaruh pembiayaan ultra mikro terhadap kinerja usaha dan kesejahteraan debitur. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik*, 8(4), 353–369. <https://doi.org/10.33105/itrev.v8i4.709>
- Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Jawa Timur. (2023). *Jumlah data UKM*. Diskopukm.jatimprov.go.id. <https://diskopukm.jatimprov.go.id/ppid/info/informasi-setiap-saat>
- Grindle, M. S. (2007). Good enough governance revisited. *Development Policy Review*, 25(5), 553–574. <https://doi.org/10.1111/j.1467-7679.2007.00385.x>
- Junaidi, M. (2023). UMKM hebat, perekonomian nasional meningkat. *DJPB Kemenkeu*. <https://djpb.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/lainnya/opini/4133-umkm-hebat,-perekonomian-nasional-meningkat.html>
- Mariska. (2023). KTT ASEAN 43: Momentum peningkatan kinerja UMKM RI dan ASEAN. *Kontrak Hukum*. <https://kontrakhukum.com/article/ktt-asean-43-umkm/>
- Mutiarin, L. D. M. P., & Darmawan, D. (2018). Efektivitas inovasi kebijakan publik: Pengaruhnya pada kualitas pelayanan publik di Indonesia. *Asosiasi Program Pascasarjana Perguruan Tinggi Muhammadiyah (APPPTMA)*. <https://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/29132/C.54.pdf?sequence=1>
- Neo, B. S., & Chen, G. (2011). *Dynamic governance: Embedding culture, capabilities and change in Singapore*. SSRN. <https://doi.org/10.2139/ssrn.1477817>
- Osborne, S. P. (2010). *The new public governance?: Emerging perspectives on the theory and practice of public governance*. Taylor & Francis. <https://books.google.co.id/books?id=46mMAGAAQBAJ>

- Suhayati, M. (2024). Penurunan penyaluran Kredit Usaha Rakyat tahun 2023. *Berkas DPR*. <https://berkas.dpr.go.id>
- Tambunan, T. T. H. (2019). Micro and small industries and the use of internet: Findings from Indonesian. *Jurnal Ekonomi Indonesia*, 8(2), 203–224. <https://doi.org/10.52813/jei.v8i2.20>
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2015). *Economic development* (12th ed.). Pearson Education Limited. <https://www.pearson.com>